

**PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A
SEBAGAI PENDIDIKAN ALTERNATIF DI LINGKUNGAN PESANTREN
(Studi Kasus di PKBM Ibnu Ali Sidoarjo)**

Intan Wijayanti, STAI Al-Akbar Surabaya, email: intansetoprabowo@gmail.com

Abstract

In UU Sisdiknas No. 20 of 2003, that equality education is one form of non-formal education. This research to find out about the Package A equivalence education program as an alternative education in pesantren, with the research location at PKBM Ibnu Ali Sidoarjo. This research used a qualitative research method with a case study. Data was collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and verification or conclusion. The results of this study are the birth of the Package A equality education program PKBM Ibnu Ali at Ma'had Ibnu Ali started with the caregiver's desire to facilitate his students to get general education; the existence of the PKBM Ibnu Ali is considered very appropriate as an alternative education in Ma'had Ibnu Ali on the grounds that the curriculum is adaptive, flexible, and independent. Factors supporting the existence of PKBM Ibnu Ali include a curriculum that is integrated with the Qur'an; the academic qualifications of the tutors; the location is in pesantren; solid teamwork; and positive response from students and their parents. While the inhibiting factors are the limited infrastructure, media and learning resources; students of different levels are still made into one class; limited stakeholder; and Ma'had locations scattered in several locations.

Keywords: *Equality education, Package A, alternative education, pesantren*

Abstrak

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui program pendidikan kesetaraan Paket A sebagai pendidikan alternatif di lingkungan pesantren, dengan lokasi penelitian yakni PKBM Ibnu Ali Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah lahirnya program pendidikan kesetaraan Paket A PKBM Ibnu Ali di Ma'had Ibnu Ali berawal dari keinginan pengasuh untuk memfasilitasi para santrinya agar mendapatkan pendidikan umum; keberadaan program pendidikan kesetaraan PKBM Ibnu Ali dirasa sangat tepat sebagai pendidikan alternatif di Ma'had Ibnu Ali dengan alasan kurikulum yang adaptif, fleksibel serta independen. Faktor pendukung eksistensi PKBM Ibnu Ali antara lain kurikulum yang terintegrasi Al-Qur'an; kualifikasi akademik para tutor; lokasi berada di lingkungan pesantren; *teamwork* yang solid; dan respon positif dari santri dan walisantri. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sarana prasarana, media dan sumber belajar; peserta didik yang berbeda tingkatannya masih dijadikan satu kelas; terbatasnya tenaga pendidik; dan lokasi Ma'had yang tersebar di beberapa lokasi.

Kata Kunci: Pendidikan kesetaraan, Paket A, pendidikan alternatif, pesantren

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi unik dan berbeda dengan makhluk lain. Potensi tersebut yaitu *al 'aql* atau akal. Dengan potensi akal yang dimiliki, manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk meningkatkan kualitas hidup¹. Salah satu cara untuk mewujudkannya antara lain melalui pendidikan. Sebagaimana hadits yang disampaikan Rasulullah SAW.: *مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ* Yang artinya "*Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu.*" (H.R. Ahmad)

Pendidikan merupakan pintu gerbang manusia menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mengembangkan sumber daya manusia suatu bangsa, yaitu agar manusia dapat terbebas dari kebodohan dan keterbelakangan. Sejarah membuktikan bahwa salah satu faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa yaitu bukan dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan melalui proses pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, serta berorientasi masa kini dan masa depan.²

Berbicara tentang pendidikan yang menyeluruh, pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hal memperoleh pendidikan. Hak dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi setiap warganya tanpa memandang usia, keyakinan, maupun status sosial. Oleh karena itu, agar amanat tersebut terwujud, pemerintah telah mengusahakannya dengan memberikan beberapa alternatif jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat.

Dalam pasal 13 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya".³ Selanjutnya pada pasal 1 (12) disebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat

¹ Nisak, "KONSEP BELAJAR MENURUT ISLAM DAN PARA TOKOH ISLAM."

² Ani Nurleni dan Novi Widiastuti, "Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Pelatihan Tata Boga (Studi Kasus di PKBM Bina Mandiri Cipageran)," *Jurnal Comm-Edu* 1, no. 2 (Mei 2018): 2.

³ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.



diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang.⁴ Untuk mengetahui perbedaan kedudukan pendidikan nonformal, kita perlu mengetahui fungsi dari pendidikan nonformal itu sendiri yaitu mengembangkan potensi peserta didik yang lebih ditekankan pada penguasaan aspek sikap dan kepribadian profesional, aspek pengetahuan, serta aspek keterampilan fungsional. Beberapa bentuk pendidikan nonformal yaitu PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Sedangkan satuan penyelenggara pendidikan nonformal antara lain LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), KB (Kelompok Bermain), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), MT (Majelis Taklim), serta satuan lainnya yang sejenis.⁵

Yulaelawati (2011) dalam Sururi menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah suatu wadah berbagai macam kegiatan pembelajaran masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat guna memperluas pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat. PKBM merupakan satu dari berbagai jenis pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal.⁶

Salah satu program dalam PKBM yaitu pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD atau MI, SMP atau MTs, SMA, MA atau SMK yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.⁷

Seiring berjalannya waktu yang didorong oleh peningkatan mutu di lingkungan pendidikan nonformal, stigma bahwa pendidikan kesetaraan berkedudukan sebagai penambah, pelengkap atau pengganti pendidikan formal mulai bergeser. Artinya, pendidikan kesetaraan merupakan alternatif

⁴ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

⁵ Pasal 26 ayat (2-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

⁶ Sururi, *Inovasi PKBM Dalam Pembelajaran*, (Metro: Iqra', 2019), 1.

⁷ *Ibid.*, 4.



pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat. Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan bagi warga belajar yang dalam kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan akses pendidikan formal.

Salah satu lembaga di masyarakat yang dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yaitu pondok pesantren. Sebuah pesantren biasanya memiliki asrama (فندق) atau tempat tinggal santri sehingga pesantren sering disebut dengan istilah pondok pesantren. Secara etimologi, kata *pesantren* berasal dari kata *santri*, yang asal-usul bahasanya menurut Rizki (2010) ada dua pendapat. Pertama, santri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “santri” artinya melek huruf. Kedua, kata santri berasal dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti seseorang yang mengikuti seorang guru ke manapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuan kepadanya.⁸ Jika diberi awalan pe- dan akhiran -an menjadi pe-*santri*-an maka artinya tempat para santri.⁹ Jadi, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam dengan kyai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan, dan pondok sebagai tempat tinggal santri.¹⁰

Kita ketahui bahwa terdapat sebagian pondok pesantren, khususnya di Indonesia, yang memberikan layanan pendidikan formal baik SD/MI, SMP/MTs, ataupun SMA/MA/SMK. Namun, sebagian pesantren lain memilih untuk tidak menyelenggarakan pendidikan formal dikarenakan berbagai macam faktor, seperti faktor geografis, kesesuaian kurikulum pemerintah dengan tujuan pesantren, keluwesan waktu, ketersediaan *stakeholder*, kelengkapan sarana prasarana dan berbagai faktor lainnya. Bagi sebagian masyarakat hal tersebut tidak masalah, akan tetapi menjadi sebuah kegelisahan untuk sebagian lainnya akan masa depan putra-putrinya jika hanya menuntut ilmu agama semata, terutama bagi warga belajar yang berusia sekolah dasar. Pada hakikatnya, pendidikan dasar merupakan bekal utama yang semestinya diperhatikan oleh setiap warga negara. Di pendidikan dasar, peserta didik memperoleh pengetahuan awal yang merupakan modal utama memperoleh pengetahuan yang lebih kompleks. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 13 (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan dasar adalah mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan

⁸ Mansur Hidayat, “Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren,” *Jurnal Komunikasi ASPIKOM* 2, no. 6 (Januari 2016): 387.

⁹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 18.

¹⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.



pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai bekal hidup dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu pendidikan menengah.¹¹ Oleh karena itu, beberapa pesantren menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A untuk memberikan akses pendidikan bagi santri-santrinya selayaknya pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif di lingkungan pesantren dan memfokuskan penelitian pada Program Paket A atau setara dengan SD/MI. Untuk itu, penulis memilih lembaga PKBM Ibnu Ali yang berada di lingkungan Ma'had Ibnu Ali Waru Sidoarjo sebagai lokasi penelitian.

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui program pendidikan kesetaraan Paket A sebagai pendidikan alternatif di lingkungan pesantren dengan mengambil lokasi di PKBM Ibnu Ali yang ada di dalam lingkungan Ma'had Ibnu Ali Sidoarjo.

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu deskripsi yang intensif, holistik dan analitis terhadap suatu entitas, fenomena atau unit sosial.¹² Peneliti memposisikan diri sebagai *key instrument* atau instrumen kunci dengan berusaha menjalin kedekatan dengan para informan antara lain pengasuh Ma'had Ibnu Ali, penyelenggara, kepala, para tutor atau pendidik, dan peserta didik PKBM Ibnu Ali Paket A serta walisantri, dengan harapan muncul rasa percaya antara peneliti dengan para informan sehingga dapat memperlancar penggalan data. Selain itu, peneliti juga sekaligus sebagai pengumpul data, dan instrumen yang lain merupakan penunjang.

Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah atau *natural setting*, sumber data primer, sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui: 1) *Participant observation* atau teknik observasi berperan serta, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengawasan atau

¹¹ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

¹² Donald Ary, et.al., *Introduction to Research in Education*, (Canada: Wadsworth, 2010), 22.



pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijumpai;¹³ 2) *In dept interview* atau wawancara mendalam, yaitu komunikasi antara dua orang yang mana seseorang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk tujuan tertentu;¹⁴ dan 3) Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber bukan manusia, yaitu terdiri dari dokumen dan catatan atau rekaman.¹⁵

Langkah selanjutnya adalah analisis data dengan mengaplikasikan model Miles dan Huberman, yaitu terdiri dari *data reduction*, merangkum dan memilih hal-hal yang penting; *data display*, menyajikan data dalam bentuk teks naratif, grafik, maupun *flowchart*; dan *conclusion drawing/verivication*, penarikan kesimpulan.¹⁶ Langkah terakhir yaitu menguji tingkat keabsahan data melalui teknik triangulasi meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji konfirmabilitas (*confirmability*).¹⁷

Hasil

Profil dan Sejarah Berdirinya PKBM Ibnu Ali

Ma'had Ibnu Ali merupakan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo yang berbasis *Tahfidzul Qur'an*. Ma'had Ibnu Ali didirikan oleh KH. Mudawi Ma'arif, Lc, MHI pada tahun 2011. Pada awal berdirinya, belum banyak yang mengenal Ma'had Ibnu Ali, dan santri yang mondok rata-rata adalah lulusan SMA. Setelah beberapa tahun, santri yang mondok semakin bertambah dan heterogen. Tidak hanya lulusan SMA, tetapi banyak juga santri usia SD, SMP, dan SMA.

Dikarenakan tidak adanya akses sekolah formal, KH. Mudawi berkeinginan agar santri-santrinya mendapatkan pendidikan. Lalu pada tahun 2015, dengan dijembatani oleh Yayasan Al-Falah Darussalam, Yayasan Ibnu Ali yang diwakili oleh empat orang yaitu Bu Ima, Bu Lena, Bu Dewi dan Bu Ayu (selanjutnya disebut pemrakarsa PKBM Ibnu Ali), mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan nonformal ke Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam waktu satu bulan, surat izin penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di Ma'had Ibnu Ali

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 136.

¹⁴ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 108.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 229-236.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 338.

¹⁷ *Ibid.*, 270.



turun dengan nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibnu Ali, dengan Ketua PKBM pertama yaitu Bu Dewi Rachmawati, SE. Sesuai dengan usia santriwan-santriwati, program yang diselenggarakan saat itu adalah program Paket A, Paket B dan Paket C.

Saat ini, Ma'had Ibnu Ali yang beralamatkan di Jl. Anjasmoro DN. 31-32 Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini telah memiliki empat asrama yakni Ma'had Ibnu Ali I asrama putri di daerah Kepuhkiriman, Waru; Ma'had Ibnu Ali I asrama putra di Tropodo, Waru; Ma'had Ibnu Ali II asrama putri dan Ma'had Ibnu Ali II asrama putra di Kecamatan Krian. Jadi, peserta didik PKBM Ibnu Ali tersebar di empat lokasi tersebut dengan tingkatan yang beraneka ragam sesuai dengan tingkat capaian hafalannya.

Pada tahun 2022, PKBM Ibnu Ali menunjukkan eksistensinya dengan mendapatkan status akreditasi B dari BAN PAUD & PNF. Harapan yang kuat dari para pengelola dan penyelenggara dalam mewujudkan pendidikan alternatif di Ma'had Ibnu Ali untuk melahirkan generasi yang berkualitas selanjutnya dituangkan dalam visi dan misi. Visi PKBM Ibnu Ali adalah: "Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, kreatif, berakhlak mulia yang berdasarkan pada iman dan taqwa kepada Allah SWT." Adapun misi PKBM Ibnu Ali yaitu: (1) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat yang berkualitas dan terjangkau; (2) Memberikan bekal pendidikan yang berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT; (3) Memfasilitasi kreatifitas anak didik dalam membantu peningkatan kecakapan hidupnya.

Keberadaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A Sebagai Pendidikan Alternatif di Lingkungan Pesantren

Pandangan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan sangat beraneka ragam, pastinya akan sangat berbeda dengan pendidikan formal. Selama ini, eksistensi pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masih dipandang sebelah mata. Sebagian masyarakat masih ragu-ragu untuk memilih pendidikan kesetaraan sebagai jalur untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Tidak sedikit pula yang meragukan kualitas lulusan pendidikan kesetaraan.

Lahirnya PKBM Ibnu Ali memang berawal dari kebutuhan. Namun, kurikulum yang diterapkan tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sebagai santri, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini PKBM Ibnu Ali menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan pembelajaran yang dipadukan

dengan kurikulum terintegrasi Al-Qur'an yang disusun oleh lembaga sendiri. Dalam praktiknya, peserta didik pada Program Paket A tidak hanya mendapatkan materi-materi yang berasal dari modul, ibarat *sambil menyelam minum air*, mereka juga diajak untuk merenungkan sebuah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah menyerap materi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini, sebagian besar santri Ma'had Ibnu Ali adalah usia sekolah menengah sehingga peserta didik PKBM Ibnu Ali didominasi Paket B dan Paket C, sedangkan peserta didik Program Paket A di PKBM Ibnu Ali berjumlah delapan anak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Peserta Didik Program Paket A PKBM Ibnu Ali
Tahun Pelajaran 2022-2023

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
III	0	1	1
IV	0	1	1
V	4	0	4
VI	1	1	2
Total	5	3	8

Pembelajaran Program Paket A berlangsung selama lima hari seminggu dari hari Senin hingga Kamis dan hari Sabtu, dilaksanakan setelah peserta didik melakukan setoran hafalan Al-Qur'an ke ustadz dan ustadzah yaitu mulai pukul 10.00 hingga 11.30. Mata pelajaran yang diajarkan antara lain Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tutor yang mengampu Program Paket A berjumlah dua orang tutor. Dikarenakan keterbatasan tutor untuk tingkat dasar inilah, peserta didik Program Paket A dijadikan satu kelas meskipun jenjangnya berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut tutor diharapkan memiliki strategi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai.

Pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan nonformal yang diakui dalam sistem pemerintahan sebagai salah satu jalur pendidikan yang bisa ditempuh peserta didik. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan untuk memberikan pelayanan bagi anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah atau orang dewasa yang belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar di dunia pendidikan formal saat usia pada umumnya sekolah dikarenakan berbagai macam faktor. Pendidikan kesetaraan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, usia, waktu, kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pendidikan kesetaraan adalah solusi bagi dunia pendidikan pada era saat ini, karena dalam pendidikan kesetaraan tidak hanya mengedepankan sistem



pembelajaran pada umumnya, akan tetapi juga mengedepankan pendidikan moral dan karakter seutuhnya.

Sebagai jalur pendidikan yang memberikan pemecahan bagi permasalahan yang berkaitan dengan layanan pendidikan masyarakat, khususnya anggota masyarakat yang tidak terlayani pendidikan formalnya, maka pendidikan kesetaraan kiranya pantas disebut sebagai pendidikan alternatif. Istilah alternatif berarti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.¹⁸ Jika disandingkan dengan pendidikan, maka memiliki makna beberapa jalur yang dapat dijadikan pilihan masyarakat dalam menempuh pendidikan.

Keberadaan pendidikan kesetaraan di Ma'had Ibnu Ali, khususnya Program Paket A, sangat berkaitan erat dengan tujuan awal didirikannya PKBM Ibnu Ali, yaitu memfasilitasi para santri dengan pengetahuan umum di luar pengetahuan agama. Pendidikan kesetaraan memberikan ruang yang lebih terbuka untuk melengkapi kebutuhan belajar para santri Ma'had Ibnu Ali yang belum tentu didapatkan di sekolah formal. Adanya PKBM ini menjadi semacam “rekreasi otak” bagi para santri, karena mereka tidak harus fokus ke hafalannya sepanjang hari.

Ada semacam stigma bahwa santri tidak akan mampu menghafalkan Al-Qur'an sesuai target apabila bersekolah di jalur formal, dan sebaliknya mereka tidak akan mampu menjalani pendidikan formal yang padat karena ada beban hafalan yang tidak sedikit. Namun, jalur pendidikan umum dan ijazah negara adalah kebutuhan para santri yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan adalah solusi kebutuhan santri untuk mengenal dan mendapatkan pendidikan umum sehingga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penyelenggara, ada beberapa faktor mengapa lembaga memilih pendidikan kesetaraan menjadi program layanan pendidikan di Ma'had Ibnu Ali. Pertama, kurikulum yang adaptif. Ma'had Ibnu Ali merupakan pesantren *tahfidz*. Dan dalam praktik pembelajarannya, PKBM Ibnu Ali menerapkan kurikulum yang terintegrasi dengan ayat-ayat kauniyah (ayat Al-Qur'an), dengan tetap memperhatikan kurikulum pemerintah. Tujuan penerapan ini adalah agar peserta didik lebih bisa mencerna dan menelaah keilmuan yang diperoleh. Artinya, kurikulum yang terintegrasi ini dirasa sangat adaptif terhadap kondisi dan

¹⁸ KBBI Daring, s.v. "kamus", diakses 20 Feb 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alternatif>

potensi para peserta didik atau santri yang tinggal di lingkungan pesantren. Kedua, waktu pembelajaran yang lebih fleksibel dan luwes. Pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan tidak terikat jam sekolah, seperti pendidikan formal yang sebagian besar dilaksanakan di pagi hari atau sore hari saja. Namun, waktu penyelenggaraannya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di pesantren. Ketiga, *independent*. Pendidikan kesetaraan tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan sebagaimana pendidikan formal. Oleh karena itu, PKBM Ibnu Ali bisa mendesain sendiri model dan perangkat pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan potensi peserta didik.

Keberadaan pendidikan kesetaraan di Ma'had Ibnu Ali merupakan pilihan jalur pendidikan yang tepat karena melalui sistem pendidikan ini bisa membantu keikutsertaan santri dalam menyelesaikan program wajib belajar dua belas tahun. Dengan adanya pendidikan kesetaraan, Ma'had Ibnu Ali tetap menjaga entitasnya sebagai pesantren *tahfidzul Qur'an*, di sisi lain peserta didik juga mendapatkan pendidikan agama sekaligus pendidikan umumnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendidikan Kesetaraan Paket A di Lingkungan Pesantren

Program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali tentunya terdapat hal yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaannya yang notabene berada di lingkup pondok pesantren. Faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali yaitu kurikulum. Kurikulum yang diterapkan PKBM Ibnu Ali merupakan kurikulum terintegrasi Al-Qur'an. Sehingga dalam praktiknya, kurikulum ini akan mudah diaplikasikan oleh peserta didik yang mana Al-Qur'an sudah menjadi bagian dari peserta didik yang juga penghafal Al-Qur'an.

Selanjutnya dilihat dari para pendidik atau tutor. Para tutor Paket A di PKBM Ibnu Ali memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Para tutor sangat menguasai materi yang disampaikan kepada peserta didik serta dapat menguasai kelas. Selain itu, lokasi pembelajaran yang masih berada di lingkungan pesantren (tempat tinggal santri), jadi para santri tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mengikuti pembelajaran.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya *teamwork* yang solid para pengemban tugas. Pengelola PKBM senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terkait kebijakan maupun pembelajaran dan hal lainnya menuju sinergitas bersama. Dan adanya respon positif dari para santri dan wali santri menjadi dorongan para tutor untuk membantu dan memotivasi peserta didik agar selalu bersemangat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan pendidikan.

2. Faktor Penghambat

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali antara lain masih terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran. Di antaranya yaitu ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lainnya. Dikarenakan PKBM berada dalam satu bangunan dengan Ma'had Ibnu Ali, ruang kelas dan ruang praktikum masih memanfaatkan aula-aula Ma'had. Selain itu, kurang tercukupinya sumber belajar seperti modul dan buku-buku pelajaran untuk seluruh peserta didik, juga media dan alat peraga, serta sarana prasarana yang lain.

Sedangkan dilihat dari peserta didiknya, peserta didik Paket A di PKBM Ibnu Ali adalah para santri Ma'had Ibnu Ali yang usianya adalah usia sekolah dan sesuai dengan jenjangnya. Namun, dalam pembelajaran masih dijadikan dalam satu kelas sehingga tutor harus mampu mensiasatinya agar pembelajaran tetap berlangsung sesuai dengan tujuan.

Adanya beberapa lokasi Ma'had menjadi perhatian utama para pengelola PKBM. Di satu sisi, seluruh cabang mesti diakomodir kebutuhan pembelajarannya, namun di sisi lain ketersediaan tenaga pendidiknya terbatas. Sehingga para tutor harus siap mengajar di berbagai lokasi tersebut (*mobile*) meski harus menempuh jarak yang tidak dekat.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali di Ma'had Ibnu Ali yang ditujukan untuk memfasilitasi para santrinya agar bisa mendapatkan pendidikan umum dinilai optimal sebagai pendidikan alternatif yang menunjang pengetahuan umum santri.

2. Program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali memiliki kurikulum yang adaptif, fleksibel serta *independent*. Para santri terpenuhi kebutuhan pendidikannya dan Ma'had Ibnu Ali bisa tetap menjaga entitasnya sebagai pesantren *tahfidzul Qur'an*.
3. Faktor pendukung eksistensi PKBM Ibnu Ali antara lain: (1) kurikulum yang terintegrasi Al-Qur'an, sehingga ilmu yang dipelajari peserta didik bisa dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an; (2) kualifikasi akademik para tutor yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran; (3) lokasi pembelajaran berada di lingkungan pesantren; (4) *teamwork* yang solid; dan (5) respon positif dan dukungan dari para santri dan walisantri. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan PKBM Ibnu Ali yaitu: (1) terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, sarana prasarana pendukung, media serta sumber belajar; (2) Terbatasnya tenaga pendidik; dan (3) lokasi Ma'had yang tersebar di beberapa lokasi menyulitkan distribusi pembelajaran sehingga para pendidik harus siap *mobile*.

Daftar Referensi

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ary, Donald. *Introduction to Research in Education*. Canada: Wadsworth, 2010.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hidayat, Mansur. "Model Komunikasi Kyai Dengan Santri di Pesantren." *Jurnal Komunikasi ASPIKOM 2*, no. 6 (Januari 2016).
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nisak, Wifqi Atho'urrohman. "KONSEP BELAJAR MENURUT ISLAM DAN PARA TOKOH ISLAM." *PREMIERE : Journal of Islamic Elementary Education* 4, no. 1 (September 9, 2022): 9–19. <https://doi.org/10.51675/JP.V4I1.207>.
- Nurleni, Ani, and Novi Widiastuti. "Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Pelatihan Tata Boga (Studi Kasus di PKBM Bina Mandiri Cipageran)." *Jurnal Comm-Edu 1* (Mei 2018): 1–6.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sururi, M. *Inovasi PKBM Dalam Pembelajaran*. Metro: Iqra', 2019.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (1989).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

